

BAB II

Gambaran Umum GATS pada WTO

Pada suatu negara, dimana terdapat kekurangan pasokan dalam pemenuhan kebutuhan nasionalnya, maka kegiatan perdagangan melalui ekspor-impor menjadi salah satu solusi untuk mencukupi permintaan kebutuhan nasional. Perdagangan menjadi pilihan untuk mencukupi dan memperluas produksi dan distribusi jasa. Negara-negara berkembang memiliki kepentingan pada sektor jasa, termasuk jasa konstruksi. Selama dua dekade terakhir pada sektor jasa telah tumbuh lebih cepat daripada perdagangan barang sehingga sektor jasa merupakan sektor terbesar dan tercepat dari pertumbuhan ekonomi dunia, sektor jasa telah menyediakan lebih dari 60% dari output global di banyak negara.¹⁴

Itulah sebabnya perlu adanya institusi dan aturan yang mengatur perdagangan jasa internasional bagi kepentingan negara-negara yang dapat memberikan akses kemudahan serta keuntungan dalam mencapai tujuan bersama.

A. Awal Pembentukan GATS

Didalam perkembangannya perdagangan jasa saat ini tidak hanya diperlukan didalam lingkup domestik, namun telah berkembang dalam lingkup internasional. Hal itu disebabkan adanya faktor-faktor pendukung seperti perkembangan teknologi, pendidikan, transportasi dan keterbukaan negara-negara dalam aktifitas perdagangan. Perkembangan perdagangan jasa yang turut menjadi kontribusi bagi perekonomian suatu negara menyebabkan perlu adanya suatu kerangka hukum di

¹⁴WTO, "Why is the liberalization of services important?", (Diakses pada 1 Januari 2011), http://www.wto.org/english/trade_serv/e/gats_factfiction2_e.htm

kerangka hukum di dalam perjanjian internasional yang mengatur perdagangan jasa, hal itu merupakan sesuatu yang penting karena memiliki potensi yang sama besar seperti pada perdagangan barang. Adanya kerangka hukum untuk perdagangan jasa akan membantu dalam menyelesaikan konflik kepentingan nasional serta kemudahan dalam proses pendistribusiannya. Salah satu lembaga yang mengatur dan memiliki kerangka hukum pada perjanjian perdagangan jasa adalah WTO.

WTO adalah suatu organisasi perdagangan dunia yang mengatur dan mengawasi aktifitas perdagangan antar negara. WTO merupakan pengganti dari perjanjian umum mengenai tarif dan perdagangan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Sistem perdagangan di dalam WTO diatur melalui suatu persetujuan yang telah disepakati dan diratifikasi oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kerangka hukum dan peraturan yang mengikat antar negara anggota yang mewajibkan pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Tujuan utama dibentuk suatu persetujuan itu adalah untuk memudahkan para pelaku perdagangan barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan

Indonesia melalui UU NO. 7/1994 pasal 1 telah mengesahkan persetujuan pembentukan WTO.¹⁵ WTO terbentuk melalui beberapa putaran perundingan, diantaranya dimulai dari perundingan putaran Tokyo lalu selanjutnya adalah putaran Uruguay yang menghasilkan kesepakatan pembentukan WTO.¹⁶ Pada putaran Uruguay ini merupakan suatu perundingan yang mencakup semua peraturan di bidang perdagangan sehingga putaran ini berlangsung selama 7,5 tahun. Di dalam perundingan ini isu-isu yang dibahas antara lain Barang atau *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), Hak atas kekayaan intelektual atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), Penyelesaian sengketa atau *Dispute Settlements* dan Jasa atau *General Agreement Trade in Service* (GATS).

Salah satu isu utama yang dibahas dalam perundingan putaran Uruguay adalah GATS. Perjanjian ini dianggap penting karena perdagangan pada sektor jasa telah tumbuh lebih cepat daripada perdagangan barang. GATS dikhususkan untuk mengatur negoisasi multilateral dan komitmen pemerintah terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan jasa. Di dalam perjanjian GATS terdapat empat model pelayanan penyediaan jasa yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.¹⁷

¹⁵Hakitree, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan", (Diakses pada 1 Januari 2011), http://hakitree.com/UU_7_1994_ID

¹⁶Wikipedia, "World Trade Organization", (Diakses pada 1 Januari 2011), http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization

¹⁷Wikipedia, "General Agreement Trade in Service", (Diakses pada 1 Januari 2011), http://en.wikipedia.org/wiki/General_Agreement_on_Trade_in_Services

Tabel 2.1
Mode Penyediaan Jasa Lintas Batas

Criteria Kriteria		Supplier Kehadiran
Mode 1: Cross-border supply	Pelayanan yang diberikan dalam wilayah Anggota, dari wilayah Anggota lain	Layanan yang tidak hadir di wilayah anggota pemasok
Mode 2: Konsumsi luar negeri	Pelayanan yang diberikan di luar wilayah Anggota, di wilayah Anggota lain, untuk layanan konsumen Anggota	Layanan pemasok hadir dalam wilayah Anggota
Mode 3: kehadiran Komersial	Service delivered within the territory of the Member, through the commercial presence of the supplier. Pelayanan yang diberikan dalam wilayah Anggota, melalui kehadiran komersial pemasok	
Mode 4: Keberadaan orang pribadi	Pelayanan yang diberikan dalam wilayah Anggota, dengan hadir pemasok sebagai orang pribadi	
Catatan: Dari MTN.GNS/W/124 dokumen, tersedia di Organisasi Perdagangan Dunia Website, diposting milik ISTIA		

Sumber : Wikipedia

Menurut tabel di atas dapat diketahui empat model pelayanan jasa yang diatur dalam GATS yaitu, mode pasokan lintas batas (*cross border supply*) merupakan suatu pelayanan jasa yang diberikan dari wilayah satu anggota ke dalam wilayah anggota lain, contohnya ketika konsumen warga negara Indonesia membeli jasa dari luar negeri tanpa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Misalnya konsumen jasa pengobatan melalui telepon, pemesanan jasa arsitektur melalui email atau telepon.

Mode konsumsi luar negeri (*consumption abroad*) pelayanan jasa yang diberikan dimana konsumen bergerak ke wilayah anggota lain untuk memperoleh layanan. Contohnya warga negara Indonesia pergi ke luar negeri untuk menjadi konsumen jasa di luar negeri, misalnya menjadi pelajar di Singapura, atau menjadi wisatawan di Australia.

Mode kehadiran komersial merupakan penyedia pelayanan satu anggota menetapkan kehadiran teritorial, termasuk melalui kepemilikan atau sewa tempat, di wilayah anggota lain untuk memberikan layanan. Contohnya ketika suatu perusahaan pemasok jasa dari negara lain beroperasi di Indonesia. Misalnya perusahaan Price Water House (jasa konsultasi) dan Citibank (jasa perbankan) beroperasi di Indonesia.

Mode pergerakan manusia (*movement of natural person*), yaitu layanan jasa berupa layanan orang-orang dari satu anggota memasuki wilayah anggota lain untuk menyediakan layanan. Contohnya ketika tenaga kerja berpindah ke negara lain. Misalnya pekerja asing yang bekerja secara pribadi sebagai penyedia jasa konsultan di Indonesia.¹⁸

Banyaknya mode yang dibentuk dalam perjanjian GATS tersebut adalah suatu usaha untuk membuka dan memperluas pasar, menghapuskan rintangan ataupun hambatan perdagangan sesuai dengan tujuan dari WTO.

B. Struktur GATS

GATS merupakan suatu aturan yang menetapkan adanya keadilan dalam perdagangan, tidak memihak dan memudahkan pergerakan perdagangan jasa. Meskipun begitu, GATS memiliki pengakuan atas hak-hak negara anggota dalam menentukan kebijakannya sendiri di dalam perdagangan serta dalam mencapai suatu tujuan negara anggota masing-masing.¹⁹ GATS memiliki prinsip non-diskriminasi, namun tidak bersifat wajib untuk dilaksanakan yang sering disebut

¹⁸Koran Buruh, "Sekilas GATS", (Diakses pada 1 Januari 2011), <http://www.korانبuruh.org/berita/ekonomi/556-sekilas-gats.html>

MFN (*Most Favourable Nations*) yaitu prinsip yang memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap negara anggota WTO dalam memberikan fasilitas perdagangan. Negara anggota dapat memberlakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip MFN selama kurun waktu tertentu, tetapi harus diikuti dengan penyusunan rencana yang jelas untuk pelaksanaannya dalam jangka atau batas waktu tertentu.²⁰

GATS mengatur segala layanan pada sektor jasa kecuali dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan hak-hak yang mengatur sektor transportasi udara, serta semua jasa yang terkait dengan hak lalu lintas. WTO memiliki penyesuaian yang besar terhadap kebijakan pemerintah dalam menentukan peraturan untuk negara anggotanya, seperti halnya yang dibagi dalam empat bagian utama penyesuaiannya yaitu :²¹

1. Pemerintah dapat memilih sektor atau subsektor jasa mana saja yang akan dibuat komitmen untuk menjamin hak-hak pemasok asing dalam menyediakan jasa. Dalam hal ini, setiap anggota GATS harus memiliki jadwal komitmen.
2. Pemerintah dapat menentukan batasan dalam menjamin tingkat akses pasar dan tingkat perlakuan nasional.

²⁰ WTO, "*Principles of the trading system*", (Diakses pada 1 januari 2011), http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm

²¹ WTO, "*Structure of the GATS*", (Diakses pada 1 januari 2011),

3. Pemerintah dapat membatasi komitmen terhadap satu atau lebih dari empat model layanan jasa yang telah disepakati untuk diperdagangkan. Pemerintah juga dapat menarik dan melakukan negoisasi ulang terhadap komitmen yang dibuat.
4. Dalam rangka memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada mitra dagang tertentu, pemerintah dapat mengambil pengecualian terhadap prinsip perlakuan nasional yang berlaku untuk semua layanan jasa yang terjadwal maupun tidak selama jangka waktu 10 tahun.

Didalam perjanjian GATS, anggota-anggotanya memiliki suatu kewajiban yang dikategorikan kedalam dua kewajiban utama yaitu kewajiban umum dan komitmen khusus.²² Didalam Kewajiban Umum, menerangkan bahwa kewajiban ini berlaku secara mengikat dan secara langsung ataupun secara otomatis terhadap seluruh anggota dan sektor jasa. Anggota diwajibkan untuk memperluas dan menghilangkan hambatan terhadap perdagangan jasa atau pemasok jasa dengan tanpa syarat beserta seluruh anggota lainnya.²³ Didalam kewajiban umum GATS semua anggota diwajibkan untuk memudahkan transaksi perdagangan antara anggota-anggotanya, mengurangi atau bahkan menghapuskan segala bentuk persyaratan yang akan menghambat proses perdagangan seperti, tarif atau bea cukai, kuota, subsidi, muatan lokal, peraturan administrasi, dan peraturan antidumping.²⁴

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Wikipedia, "Hambatan Perdagangan Internasional", (Diakses pada Tanggal 10 Januari 2011), http://id.wikipedia.org/wiki/Hambatan_perdagangan

Hambatan dalam perdagangan internasional dapat merugikan masyarakat karena masyarakat tidak dapat memaksimalkan keuntungan. Pihak yang akan diuntungkan dengan adanya hambatan dalam perdagangan ini adalah produsen dan pemerintah.

Produsen akan mendapatkan proteksi dengan adanya hambatan perdagangan dan pemerintah akan mendapatkan penghasilan dari bea-bea.²⁵ Diberlakukannya kewajiban untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan hambatan perdagangan maka masyarakat pada anggota negara-negara dalam WTO akan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal, salah satunya ditandai dengan adanya pertumbuhan ekspor-impor.

Kewajiban umum yang lainnya adalah adanya transparansi atau asas keterbukaan antara anggota GATS dalam melakukan kebijakan perdagangan pada masing-masing negara anggota. Dimana setiap kebijakan perdagangan yang dibuat oleh suatu negara anggota GATS harus dilaporkan kepada WTO sehingga dapat diketahui oleh anggota lainnya sehingga sesuai dengan prinsip transparansi yaitu melalui mekanisme Tinjauan Kebijakan Perdagangan atau sering disebut TPRM (*Trade Policy Review Mechanism*)²⁶. Kewajiban lainnya yang tercantum didalam GATS adalah komitmen khusus, yaitu mengenai akses pasar dan perlakuan nasional.

Didalam komitmen mengenai akses pasar, akses pasar akan dibuka berdasarkan dari sektor-sektor perdagangan yang telah disepakati melalui proses negoisasi yang berbeda pada tiap negara anggota, namun tetap dikendalikan oleh

batasan-batasan seperti contohnya mengenai pembatasan akses pasar, pembatasan jumlah pemasok jasa, nilai transaksi, bentuk hukum dari layanan jasa, dan dalam penyertaan modal asing.²⁷

Selain komitmen mengenai akses pasar, terdapat komitmen mengenai perlakuan nasional, yaitu tentang adanya perlakuan mengenai barang impor, dimana barang impor harus diperlakukan secara tidak berbeda dengan barang dalam negeri untuk memperoleh keuntungan dan persaingan dalam perdagangan. Pembatasan perlakuan nasional seperti adanya pembatasan dalam hal perlakuan barang impor oleh pemerintah dapat terjadi sesuai dengan aturan pada prinsip MFN tentang pengecualian perlakuan nasional. Selain mengharuskan adanya persamaan perlakuan terhadap barang impor, juga diharuskan untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan. Anggota memiliki kebebasannya dalam menentukan setiap sektor yang akan dijadikan obyek perdagangan sesuai dengan komitmen yang mereka bentuk. Komitmen tersebut merupakan suatu kebijakan nasional yang mencakup mengenai kegiatan perdagangan seperti tentang pembayaran internasional dan transfer.²⁸

C. Liberalisasi Progresif Sektor Jasa

Dalam hal pencapaian kepentingan pada negara-negara berkembang terhadap perjanjian ini, GATS telah mengaturnya dalam pelaksanaan liberalisasi progresif. Secara khusus, tujuannya adalah untuk memfasilitasi peningkatan keikutsertaan negara berkembang dalam perdagangan jasa. Gagasan liberalisasi

progresif merupakan salah satu prinsip dasar dari GATS, dalam Pasal XIX disebutkan bahwa liberalisasi yang terjadi sesuai dengan tujuan kebijakan nasional dan tingkat perkembangan seluruh negara anggota dan di sektor-sektor individu.

Negara-negara berkembang diberikan fleksibilitas untuk membuka lebih sedikit sektor, meliberalisasi lebih sedikit tipe transaksi dan semakin memperluas akses pasar dengan situasi perkembangan mereka. Ketentuan lain memastikan bahwa negara-negara berkembang memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam beberapa hal seperti dalam mencapai kebijakan integrasi ekonomi, mempertahankan pembatasan pada neraca pembayaran dan dalam menentukan akses serta penggunaan jaringan telekomunikasi dan jasa transportasi. Selain itu, negara berkembang berhak untuk menerima bantuan teknis dari Sekretariat WTO.²⁹

Perjanjian mengenai perdagangan jasa pada Putaran Uruguay merupakan langkah pertama dalam proses jangka panjang pembentukan peraturan dan liberalisasi perdagangan multilateral. Selanjutnya diteruskan dengan adanya pertemuan tingkat menteri secara berturut-turut yang bertujuan untuk mencapai liberalisasi progresif yang akan dimulai tidak lebih dari lima tahun dari tanggal berlakunya GATS.

Adanya pembaharuan dalam perjanjian dianggap perlu untuk anggota agar dapat memperoleh pengalaman sebelum mempertimbangkan komitmen lebih mendalam. Selain itu, pemerintah dianggap membutuhkan waktu untuk

mempersiapkan perundang-undangan yang diperlukan mengenai standar mutu, perizinan persyaratan dan kualifikasi yang menjamin bahwa liberalisasi eksternal yang kompatibel dengan dan kondusif untuk tujuan kebijakan dasar pelayanan penting atau sosial yang kurang beruntung. Tujuan negosiasi komitmen khusus ini antara lain :³⁰

1. Tujuan dari negosiasi komitmen khusus ini adalah tiap negara anggota harus mengikuti negosiasi-negosiasi pada putaran yang akan berlangsung secara berturut-turut dari tanggal berlakunya WTO sampai sesudahnya, dengan maksud untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dari liberalisasi atau yang disebut liberalisasi progresif.
2. Negosiasi diarahkan pada pengurangan atau penghapusan efek negatif terhadap perdagangan jasa, yang dapat memberikan efektifitas pada akses pasar. Proses negosiasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memajukan kepentingan seluruh anggota atas dasar saling menguntungkan dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Proses liberalisasi harus dilaksanakan dengan menghormati tujuan kebijakan nasional dan tingkat perkembangan negara anggota, baik secara keseluruhan dan dalam sektor-sektor individu. Akan ada fleksibilitas yang sesuai bagi anggota negara berkembang untuk membuka lebih sedikit sektor dan jenis transaksi yang diliberalisasi. Dalam memperluas akses pasar, disesuaikan dengan situasi dan perkembangan mereka saat membuka akses pasar mereka yang tersedia.

³⁰WTO, "progressive liberalization", (Diakses pada 1 Februari 2011), http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/4-prolib_e.htm

untuk pemasok jasa asing disertai dengan melampirkan kondisi akses tersebut bertujuan di untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal IV.

4. Pada setiap putaran, menetapkan suatu pedoman negosiasi dan prosedur. Untuk tujuan mendirikan panduan tersebut, Dewan Perdagangan Jasa harus melakukan penilaian terhadap perdagangan jasa dalam hal secara keseluruhan dan secara sektoral dalam kaitannya dengan tujuan perjanjian ini, ditetapkan dalam ayat 1 Pasal IV. Pedoman negosiasi harus menetapkan modalitas untuk pelaksanaan liberalisasi yang dilakukan oleh anggota sejak negosiasi sebelumnya, serta perlakuan khusus untuk anggota yang kurang berkembang di bawah ketentuan ayat 3 Pasal IV.
5. Proses liberalisasi yang progresif harus berlanjut dalam setiap putaran tersebut melalui negosiasi bilateral atau perjanjian multilateral yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen khusus yang dilakukan oleh Anggota berdasarkan Perjanjian ini

Negosiasi termasuk pada sektor pertanian dan jasa, yang dimulai pada awal tahun 2000, Negosiasi yang telah dilakukan oleh Menteri-menteri tersebut berlangsung secara rutin dan selama ini telah diselenggarakan di Cancun pada tahun 2003, Jenewa tahun 2004, Hong Kong pada tahun 2005 dan di Jenewa pada

D. Mekanisme Pelaksanaan GATS Pada Sektor Jasa Konstruksi

Setiap anggota WTO dalam melaksanakan komitmennya diharuskan untuk memiliki jadwal komitmen. Jadwal komitmen merupakan suatu dokumen untuk menentukan komitmen khusus secara terperinci oleh anggota GATS dalam menjamin akses pasar dan perlakuan nasional.³¹ Jadwal komitmen juga dapat digunakan untuk menambahkan komitmen yang lebih rinci lagi dalam pelayanan sektor jasa konstruksi misalnya mengenai penerapan kebijakan tertentu atau regulasi yang akan diterapkan.³² Komitmen yang dibuat di dalam jadwal komitmen bersangkutan dengan mode pelayanan jasa yang telah disepakati dalam GATS, contohnya kehadiran komersial dan pergerakan manusia dari penyediaan jasa.

Jadwal komitmen terdiri dari dua bagian yang disebut bagian horizontal dan sektoral. Bagian horizontal, berisi tentang catatan kesepakatan yang berlaku untuk seluruh sektor layanan jasa yang tertulis pada jadwal komitmen. Bagian sektoral pada jadwal komitmen berisi tentang catatan kesepakatan hanya untuk sektor jasa konstruksi atau sektor/sub sektor tertentu. Berikut ini adalah contoh bentuk jadwal komitmen yang tercantum pada GATS.³³

³¹ Ibid

³² Ibid

³³ Bussines Briefing Trade Policy, "GATS Commitments", (Diakses pada 10 Januari 2011), <http://www.intracen.org/btp/wtn/newsletters/2010/services5.htm>

Tabel 2.2

Contoh Jadwal Komitmen

Annex: Sample schedule of commitments				
Commitments	Mode of supply	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional comments
Horizontal commitments (applicable to all sectors)	1. Cross-border supply	None	None other than tax measures that result in differences in treatment with respect to R & D services	
	2. Consumption abroad	None	Unbound for subsidies, tax incentives and tax credits.	
	3. Commercial presence (foreign direct investment or FDI)	Maximum foreign equity stake is 49 per cent	Unbound for subsidies. Under Lax x, approval is required for equity stakes over 25%; new investment that exceeds y million.	
	4. Temporary entry of natural persons	Unbound, except for the following: intracorporate transfers of executives and senior managers; specialist personnel for up to one year; specialist personnel subject to economic needs test for stays longer than one year; services sellers (sales people) for up to three months.	Unbound, except for categories of natural persons referred to in the market access column.	
Sectoral commitments: Limitations (applicable to specific service activities) I.A.D. Architectural services	Cross-border supply	Commercial presence required	Unbound	
	Consumption abroad	None	None	
	Commercial presence (FDI)	25% of senior management should be nationals	Unbound	
	Temporary entry of natural persons	Unbound, except as indicated in Horizontal commitments	Unbound, except as indicated in Horizontal commitments	

Sumber : Bussines Briefing Trade Policy

Penulisan jadwal komitmen dibuat dengan format standar agar memudahkan untuk melakukan analisis perbandingan. Setiap sektor yang ditawarkan seperti jasa konstruksi, pada jadwal harus menunjukkan empat mode pelayanan jasa, terdapat juga keterbatasan pada akses pasar atau perlakuan nasional yang

Pada penulisan jadwal, kolom pertama dengan format standar berisi sektor jasa konstruksi yang menjadi subyek komitmen, kolom kedua berisi pembatasan atas akses pasar, pada kolom ketiga berisi pembatasan perlakuan nasional. Di kolom keempat pemerintah dapat memasukkan komitmen tambahan yang tidak tunduk pada jadwal di bawah akses pasar atau perlakuan nasional.³⁴ Pada kolom Sektor atau sub-sektor berisi tentang definisi yang jelas mengenai sektor jasa konstruksi atau kegiatan yang merupakan subjek dari komitmen khusus, anggota bebas untuk menentukan sektor atau subsektor kegiatan yang akan dicantumkan pada jadwal sesuai dari hasil negosiasi dengan anggota lain.³⁵ Definisi yang digunakan dalam jadwal juga telah dibakukan. Berikut ini adalah deskripsi tentang informasi yang harus ditulis pada setiap jadwal kolom dan ringkasan definisi yang digunakan.³⁶

1. Kolom Sektor dan Subsektor

Pada kolom ini diisi sektor jasa konstruksi. Kebanyakan sektor yang tercantum dalam jadwal merupakan sektor yang juga terdapat pada daftar klasifikasi Sekretariat GATT, yaitu dua belas sektor tersebut antara lain bisnis, komunikasi, konstruksi dan rancang bangun, distribusi, lingkungan, keuangan, kesehatan, perjalanan pariwisata, rekreasi, budaya, dan olahraga, pendidikan, transportasi, dsb.³⁷

³⁴ WTO, "Guide to reading the GATS schedules of specific commitments and the list of article II (MFN) exemptions", (Diakses pada 18 Januari 2011), http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/guide1_e.htm

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

2. Kolom Akses Pasar

Jika Anggota ingin membuat komitmen pada sektor jasa konstruksi atau sektor atau subsektor lainnya harus menunjukkan mode keterbatasan pasokan yang diinginkan, lalu menetapkannya dalam akses pasar. Menurut pasal XVI ayat 2 GATS, terdapat enam kategori pembatasan yang tidak dapat ditetapkan, kecuali telah disepakati dalam jadwal. Dalam jadwal terdapat salah satu dari enam kategori tersebut. Pembatasan tersebut terdiri dari empat jenis pembatasan kuantitatif ditambah keterbatasan tentang jenis-jenis badan hukum dan partisipasi modal asing.

3. Perlakuan nasional

Kewajiban perlakuan nasional berdasarkan Pasal XVII dari perjanjian GATS yaitu layanan dan pemasok jasa dari anggota lain untuk diperlakukan sama menguntungkan seperti yang diberikan kepada pelayanan dan pemasok jasa dalam negeri. Anggota yang ingin menjaga segala hambatan pada perlakuan nasional untuk mengantisipasi adanya tindakan yang terjadi pada perlakuan yang kurang menguntungkan jasa asing atau penyedia jasa sehingga harus menunjukkan batasan-batasan yang diinginkan pada kolom ini.

4. Kolom komitmen tambahan

Pengisian data pada kolom ini tidak wajib, tetapi anggota dapat menentukan sektor jasa konstruksi atau sektor tertentu untuk membuat komitmen tambahan yang berkaitan dengan langkah-langkah lain selain yang terdapat pada jadwal berdasarkan Pasal XVI dan XVII dari GATS yaitu langkah-langkah yang akan

diambil seperti misalnya pada standar dan hal-hal perizinan. Kolom ini akan digunakan untuk menunjukkan usaha yang positif, bukan mengenai daftar tambahan pembatasan atau keterbatasan.

Perlakuan nasional merupakan kewajiban yang berlaku untuk semua aktifitas yang mempengaruhi perdagangan jasa. Namun telah disepakati bahwa pemerintah dapat mengambil langkah-langkah khusus melalui prinsip pengecualian terhadap perlakuan nasional yang akan ditinjau ulang kurang dari lima tahun. Langkah-langkah dalam prinsip pengecualian perlakuan nasional pada sektor-sektor tertentu telah ditetapkan dan berada dibawah perundingan multilateral pada putaran uruguay.

Berbeda dengan sifat jadwal yang rumit dan saling berhubungan, daftar dari pengecualian cukup jelas dan terstruktur secara langsung. Agar daftar bersifat akurat dan lengkap di dalam daftar pengecualian perlakuan nasional setiap negara diwajibkan untuk mencantumkan lima macam informasi dalam pengecualian antara lain:³⁸

- a. Deskripsi mengenai sektor atau subsektor pada pengecualian yang akan diberlakukan
- b. Deskripsi mengenai langkah yang diambil, dan menunjukkan alasan hal tersebut tidak konsisten dengan Pasal II
- c. Negara atau negara-negara yang akan mengambil langkah pengecualian
- d. Durasi pelaksanaan pengecualian
- e. Kondisi dalam mencintakan kebutuhan untuk pengecualian

Komitmen khusus yang telah disepakati mulai diberlakukan pada 1 Januari 1995, yaitu bersamaan dengan tanggal berlakunya WTO. Pada Akhir Putaran Uruguay telah terbentuk 95 jadwal komitmen pelayanan jasa dari komitmen khusus dan 61 daftar pengecualian terhadap prinsip perlakuan nasional yang telah